

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2021

Zayyan Zhafirah Arofia Susanto^{1*}, Lorentino Togar Laut², Dinar Melani Hutajulu³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan / Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Indonesia

✉ dinarmelani@untidar.ac.id

Abstrak

Ketimpangan di Pulau Jawa khususnya di berbagai kabupaten serta kota Provinsi Banten tergolong tinggi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak beberapa variabel seperti laju pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada rentang tahun 2012-2021 dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari Statistik Indonesia. Penelitian menggunakan analisis data dengan regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) di *e-views 10*. Temuan pengamatan mengungkapkan bila secara individual, jumlah penduduk dan IPM tidak memunculkan pengaruh yang signifikan bagi tingkat ketimpangan dalam hal ini pada konteks ketimpangan pendapatan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi serta investasi memiliki pengaruh signifikan secara individu. Ketika diuji secara bersama-sama, laju pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, serta investasi mempunyai pengaruh signifikan bagi presentase ketimpangan pendapatan. Sebagai implikasi dari temuan ini, dianjurkan guna menambah laju tumbuhnya perekonomian di daerah yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang rendah. Fenomena ini harapannya bisa membantu mengurangi ketimpangan pendapatan antara sejumlah kelompok masyarakat.

Kata kunci:

ketimpangan pendapatan; laju pertumbuhan ekonomi; IPM; jumlah penduduk; Investasi.

Abstract

Inequality on the island of Java, especially in various districts and cities in Banten Province, is relatively high. This research identifies the impact of several variables such as economic growth rate, HDI, population and investment on income inequality in the 2012-2021 period using data sources obtained from Statistics Indonesia. The research uses data analysis with panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) in e-views 10. Observation findings reveal that individually, population size and HDI do not have a significant influence on the level of inequality, in this case in the context of income inequality. However, the rate of economic growth and investment have a significant influence individually. When tested together, the rate of economic growth, HDI, population and investment have a significant influence on the percentage of income inequality. As an implication of these findings, it is recommended to increase the rate of economic growth in areas experiencing low economic growth. It is hoped that this phenomenon can help reduce income inequality between a number of community groups.

Keywords:

income inequality; economic growth rate; HDI; population; investment.

PENDAHULUAN

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memberi kewenangan bagi sejumlah daerah di Indonesia, seperti provinsi, kabupaten, serta kota, guna mengurus pemerintahan yang berkenaan pada layanan dasar serta non-layanan dasar. Sejumlah daerah bisa mendorong pertumbuhan perekonomian secara cepat, sementara daerah lain mengalami stagnasi bahkan kontraksi pada siklus pertumbuhan ekonomi sebab tidak bisa menggerakkan aktivitas perekonomian mereka. Persoalan ketimpangan pendapatan antara sejumlah golongan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan tinggi serta rendah, yakni persoalan umum yang ada di negara-negara miskin, sedang berkembang, hingga negara maju (Oksamulya & Anis, 2020). Tiap negara mempunyai target guna menambah kesejahteraan penduduknya, serta pemerataan pertumbuhan perekonomian yakni elemen utama guna meraih kesejahteraan sosial yang lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi yang tidak adil bisa mengurangi kesejahteraan penduduk serta memunculkan ketegangan sosial.

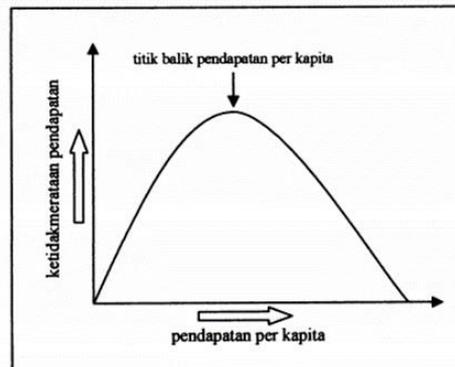
Sejumlah metrik dipakai pada pengukuran disparitas penerimaan. Pertama, tumbuhnya perekonomian diukur dengan PDRB dimana menampilkan produksi barang serta jasa di sebuah wilayah. PDRB per kapita yakni parameter kemakmuran yang memungkinkan perbandingan antar wilayah. Kedua, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencakup aspek penerimaan, pendidikan, serta kesehatan, menampilkan holistik mengenai kesejahteraan. Total penduduk juga memberi efek bagi disparitas penerimaan mengacu dari produktivitas mereka. Investasi, baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memainkan peran vital pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, khususnya pada proyek infrastruktur dimana membutuhkan investasi besar. Di samping itu, aspek non-materi seringkali dibutuhkan di tingkat pemerintah pusat serta daerah guna mendorong pertumbuhan bisnis (Sjafrizal, 2014).

Provinsi Banten yakni provinsi ke-28 di Indonesia sesudah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat melalui Undang- Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2000. Provinsi Banten ada pada lokasi strategis menjadi penghubung antara Pulau Jawa serta Pulau Sumatera, dekat dengan ibukota negara (Jakarta) serta Provinsi Jawa Barat, memberi peluang bagi pemasaran hasil produksi.

Badan Pusat Statistik berasumsi bila disparitas pembangunan tiap wilayah bisa diidentifikasi melalui indeks ketimpangan, misalnya Indeks Williamson. Indeks Williamson umumnya dihitung mengacu dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta total penduduk di berbagai sektor. Indeks Williamson Provinsi Banten mengalami fluktuasi selama periode 2012-2021. Nilainya mengalami kemerosotan dari 0,781 menjadi 0,766 antara 2012-2017. berikutnya, naik menjadi 0,769 di tahun 2019, namun turun kembali dibandingkan pada periode 2012-2015. Pada tahun 2020, selama masa resesi ekonomi sebab pandemi Covid-19, indeks Williamson menurun. Tetapi, saat ekonomi mulai pulih di tahun 2021, indeks Williamson kembali meningkat pada angka 0,770. Besarnya ketimpangan tiap daerah di Provinsi Banten dikarenakan industri pengolahan, serta Kota Cilegon, yang menjadi wilayah industri, mempunyai Indeks Williamson tertinggi.

Hipotesis Kuznets pada Kuncoro (2006) menjabarkan bila ketimpangan penerimaan awalnya bertambah selama pembangunan perekonomian, namun berikutnya merosot ketika pembangunan berlanjut. Fenomena ini tampak pada kurva Kuznets, dimana menampilkan

korelasi positif pada pertumbuhan pendapatan per kapita serta ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi bergeser menjadi korelasi negatif pada jangka panjang (Harahap, 2013).



Gambar 1. Kurva Kuznets

Mahardiki (2013) menekankan bila guna mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi serta meratakan pembangunan tiap wilayah. Salah satu cara guna meraihnya yakni melalui fokus dalam daerah yang tertinggal serta mendukung partisipasi penduduk pada pengelolaan peluang wilayah mereka.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipakai menjadi parameter laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kenaikan PDRB menampilkan perkembangan ekonomi yang baik serta pertumbuhan daerah tersebut, yang pada gilirannya bisa berdampak bagi ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Menurut Noviar (2021), akumulasi PDRB per kapita sebuah daerah dalam periode tertentu mengikutsertakan pembagian nilai PDRB wilayah tersebut dalam periode yang sama oleh total penduduk wilayah tersebut dalam periode yang bersangkutan.

Tangerang Selatan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Banten, mencapai 6,54%, sementara Kabupaten Pandeglang mempunyai laju pertumbuhan terendah, yakni 4,53%. Tetapi, di tahun 2020, semua kabupaten/kota mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Fenomena ini menampilkan ketidakmerataan yang menjadikan ketimpangan penerimaan tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Pembangunan perekonomian sebuah wilayah dianggap berhasil saat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara stabil menambah taraf hidup masyarakat, dimana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yakni parameter tunggal dimana biasanya dipakai guna menilai pencapaian pembangunan manusia di sebuah daerah. IPM tinggi menambah produktivitas penduduk serta penerimaan, namun perbedaan IPM tiap daerah bisa menciptakan ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, serta Kabupaten Serang mempunyai presentase IPM terendah di tahun 2021, pada angka masing-masing 64,03%, 65,17%, dan 66,82%. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, serta Kota Cilegon mempunyai presentase IPM tertinggi di tahun yang sama, pada angka masing-masing 81,6%, 78,5%, serta 73,35%. Perbedaan yang signifikan antara Kabupaten Lebak serta Kota Tangerang Selatan menampilkan adanya ketidakmerataan pada pembangunan antara kota serta kabupaten di Provinsi Banten, dimana menjadikan presentase IPM yang lebih rendah di kabupaten yang masih terbelakang, diukur melalui pendidikan, kesehatan, serta standar kehidupan yang layak.

Sumber daya terpenting yang lain yang memberi pengaruh bagi pembangunan ekonomi sebuah daerah yakni jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat dijadikan sumber daya dan potensi besar untuk mengembangkan suatu daerah apabila penduduknya berkualitas baik (Kamal et al. 2014). Pandangan Adelman & Morris (1973) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menurunkan pendapatan per kapita dan berkontribusi pada lambatnya pembangunan ekonomi. Ini terjadi karena migrasi dari desa ke pusat perekonomian akibat industrialisasi, yang meningkatkan ketimpangan pendapatan antara desa dan kota serta mengubah pola penduduk.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang dengan 3.293.533 jiwa, yang merupakan daerah kawasan industri, sementara jumlah penduduk terendah ada di Kota Cilegon dengan 441.761 jiwa. Di Provinsi Banten, lebih banyak penduduk berada di wilayah yang merupakan kawasan industri, seperti Tangerang dan Serang. Ini disebabkan oleh migrasi penduduk yang memiliki keterampilan dan pendidikan ke wilayah-wilayah yang telah berkembang karena peluang upah yang lebih tinggi.

Menurut Sukirno (2012), investasi merujuk pada pengeluaran untuk membeli peralatan produksi atau penanaman modal yang meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berperan penting pada tumbuhnya perekonomian, serta bisa bersumber dari sektor swasta maupun pemerintah. Nilai investasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama tahun 2012-2021 yakni hasil dari PMDN serta PMA, melalui fluktuasi nilai. Tahun 2021, Kota Cilegon mencatat investasi tertinggi (17.804.415), sementara Kabupaten Lebak terendah (1.526.103). Daerah industri memiliki investasi lebih tinggi daripada non-industri, membentuk ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten.

Mengacu dari konteks yang sudah dijabarkan, peneliti mengamati urgensi guna menginvestigasi perbedaan penerimaan yang ada di antara kabupaten serta kota di Provinsi Banten. Pengamatan ini bertujuan guna menganalisis dampak variabel-variabel misalnya pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, serta investasi bagi ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Peneliti nantinya bisa mendokumentasikan temuan-temuan ini pada suatu artikel berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2021."

METODE

Variabel dependen pada pengamatan ini yakni presentase ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Banten. Variabel independen yang dipakai pada pengamatan ini mencakup laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, serta investasi. Data mengenai presentase ketimpangan pendapatan memakai Indeks Williamson, dimana berkisar antara 0 hingga 1, serta didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten untuk tahun 2012 sampai 2021. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam harga konstan tahun 2010 dipakai pada pengukuran pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten pada periode 2012-2021. Data ini juga didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. IPM Provinsi Banten bagi periode yang sama, berupa persentase, juga dipakai menjadi salah satu variabel independen data ini juga didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Data jumlah penduduk yang dipakai pada pengamatan ini didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten serta diukur pada satuan jiwa. Variabel investasi pada pengamatan ini yakni hasil akumulasi investasi yang dijalankan oleh pemerintah serta sektor swasta, mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing (PMA), untuk Provinsi Banten selama periode 2012-2021.

Analisis data dijalankan melalui teknik regresi data panel dengan perangkat lunak Eviews 10. Pendekatan ini memadukan data *time series* (periode 2012-2021) serta data *cross section* yang mencakup 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sebagai unsur dari analisis, dijalankan uji model pengamatan melalui *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. Asumsi klasik seperti Uji Multikolinearitas serta Uji Heteroskedastisitas juga diperiksa. Uji hipotesis mengikutsertakan Uji Koefisien Determinan (R^2), Uji Parsial (t), serta Uji Simultan (F) guna menilai pengaruh variabel independen bagi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan melalui sumber yang ada, kemudian dianalisis menggunakan *E-views 10* dengan teknik regresi data panel. Berikut ini disajikan hasil perhitungan untuk pemilihan model terbaik.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.088979	(7,68)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.990219	7	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Tabel 1 menyajikan hasil output dari uji Chow, didapat angka probabilitas *Cross-section Chi-square* sejumlah $0.0000 < \alpha (0.05)$ dimana menjadikan H_0 ditolak, maka model estimasi yang cenderung sesuai yakni *Fixed Effect Model*. Berikutnya dilanjutkan pada uji Hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.575103	4	0.0015

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Pada Tabel 2 mengacu dari output uji Hausman didapat angka probabilitas *cross-section random* sejumlah $0.0015 < \alpha 0.05$ dimana menjadikan H_0 ditolak, yang menampilkan bila *Fixed Effect Model* dipilih menjadi model yang cenderung sesuai guna mengestimasi regresi. Maka, uji *Lagrange Multiplier (LM)* tidak dibutuhkan sebab pada kasus ini *Fixed Effect Model* sudah terpilih sebagai model yang sesuai. Kemudian selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan sebagai syarat pemenuhan dalam pemilihan model regresi yang tepat agar

tidak terjadi model bias dalam penelitian. Berikut ini, hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.043070	0.010568	-0.099699
X2	-0.043070	1.000000	0.072607	0.323747
X3	0.010568	0.072607	1.000000	0.142927
X4	-0.099699	0.323747	0.142927	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Tabel 3 menampilkan bila angka koefisien dari variabel bebas (laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, serta investasi) pada penelitian ini, angka di bawah 0,8 menampilkan bila tidak ada masalah multikolinearitas yang terdeteksi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.949941	24.18104	-0.287413	0.7747
X1	0.003618	0.048061	3.075280	0.0402
X2	9.544692	6.226485	1.532918	0.1299
X3	-2.541307	1.596939	-1.591362	0.1162
X4	0.075534	0.031799	2.375337	0.0204

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glesjer menampilkan bila probabilitas hasil pendeteksian heteroskedastisitas dalam tiap variabel lebih besar dibanding presentase signifikansi 0,05. Maka, bisa dikatakan bila pada kerangka pengamatan ini, tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji statistik R^2 untuk melihat sebesar apa variabel ketimpangan dapat dijelaskan oleh variabel independent.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinan

<i>R-squared</i>	0.774281
<i>Adjusted R-squared</i>	0.737768

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Hasil regresi menjabarkan bila koefisien determinasi (R^2) sejumlah 0.774281. Ini berarti sekitar 77% dari variasi pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten bisa dijabarkan melalui model yang mencakup laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, serta investasi. Sementara itu, sekitar 23% sisanya dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak masuk pada model tersebut. Mengacu dari hasil regresi didapat angka $R^2 = 0.774281$ menampilkan bila ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Banten (Y) bisa dijabarkan dengan serentak oleh laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, serta investasi sejumlah 77 persen sementara sisanya sejumlah 23 persen dijabarkan pada aspek lain yang tidak masuk pada model. Sementara angka $R = 0.737768$ bermakna bila presentase korelasi antara variabel laju pertumbuhan penduduk, indeks

pembangunan manusia, total penduduk, serta investasi, bagi variabel ketimpangan pendapatan yakni kuat serta arahnya positif. Hal ini ditandai pada angka R yang makin mendekati 1.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
C	-6.949941	-0.287413	1.99167	0.7747
X1	0.003618	3.075280	1.99167	0.0402
X2	9.544692	1.532918	1.99167	0.1299
X3	-2.541307	-1.591362	1.99167	0.1162
X4	0.075534	2.375337	1.99167	0.0204

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Mengacu dari hasil uji t tersebut bisa dikatakan bila dalam alpa 5 persen ($\alpha = 5$ persen) variabel independen laju pertumbuhan ekonomi (X_1) mempunyai angka t hitung sejumlah 3.075280 serta t tabel sejumlah 1.99167 maknanya angka t hitung $>$ t tabel maka variabel X_1 signifikan bagi variabel ketimpangan pendapatan (Y). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2) mempunyai angka t hitung sejumlah 1.532918 serta t tabel sejumlah 1.99167 sehingga angka t hitung $<$ t tabel maka variabel X_2 tidak signifikan bagi variabel ketimpangan pendapatan (Y). Variabel jumlah penduduk (X_3) mempunyai angka t hitung sejumlah -1.591362 serta t tabel sejumlah 1.99167 dimana bermakna angka t hitung $<$ t tabel maka variabel X_3 tidak signifikan bagi variabel ketimpangan pendapatan (Y). Variabel investasi (X_4) mempunyai angka t hitung sejumlah 2.375337 serta t tabel sejumlah 1.99167 bermakna angka t hitung $>$ t tabel maka variabel X_4 signifikan bagi variabel ketimpangan pendapatan (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	Prob(F-statistic)	Ftabel
21.20540	0.00000	2.72

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

Tabel 7 bisa dikatakan bila angka F- statistic dalam pengamatan ini yakni 21,20540. Angka F-statistic tersebut melampaui angka F tabel sejumlah 2,72. Maka, bisa dikatakan secara bersama- sama, variabel independen pada pengamatan ini, yakni laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, serta investasi, berpengaruh bagi variabel ketimpangan pendapatan.

Tabel 8. Hasil Hasil Analisis Regresi Data Panel FEM

Variable	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Prob.
C	-6.949941	-0.287413	1.99167	0.7747
X1	0.003618	3.075280	1.99167	0.0402
X2	9.544692	1.532918	1.99167	0.1299
X3	-2.541307	-1.591362	1.99167	0.1162
X4	0.075534	2.375337	1.99167	0.0204

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10, 2023

$$Y = -6.94994067326 + 0.0036180477344X_1 + 9.54469155118X_2 - 2.541307X_3 + 0.075534X_4 + [CX = F]$$

Penjabaran hasil analisis regresi bisa dirangkum sebagai berikut:

- a) Konstanta (-6,96) menampilkan bila seluruh variabel independen bernilai nol, maka ketimpangan pendapatan akan ada dalam level -6,96%.
- b) Laju pertumbuhan ekonomi (X_1) mempunyai koefisien positif (0,003), dimana menampilkan bila kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sejumlah 1% akan berkontribusi bagi kenaikan ketimpangan pendapatan sejumlah 0,003%.
- c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2) mempunyai koefisien positif signifikan (9,54), dimana bermakna kenaikan IPM sejumlah 1% bisa menjadikan kenaikan ketimpangan pendapatan sejumlah 9,54%.
- d) Jumlah penduduk (X_3) mempunyai koefisien negatif (-2,54), dimana menampilkan bila kenaikan jumlah penduduk sejumlah 1% bisa menurunkan ketimpangan pendapatan sejumlah 2,54%.
- e) Investasi (X_4) mempunyai koefisien positif (0,07), dimana bermakna bila kenaikan investasi sejumlah 1% bisa berkontribusi bagi kenaikan ketimpangan pendapatan sejumlah 0,07%.

Pembahasan

Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif bagi ketimpangan pendapatan, melalui kenaikan 1% laju pertumbuhan perekonomian berkontribusi bagi peningkatan 0,003% pada ketimpangan pendapatan. Walaupun Provinsi Banten mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan strategis, sebagaimana ditampilkan pada Indeks Williamson Provinsi Banten tahun 2021 sejumlah 0,770. Hasil pada studi ini konsisten dengan hasil pengamatan yang dijalankan Violin & Lutfi (2022), dimana juga menampilkan adanya dampak positif pertumbuhan perekonomian bagi ketimpangan pendapatan. Pada pengamatan ini, dijumpai bila pertumbuhan ekonomi sebenarnya menambah ketimpangan pendapatan serta jumlah penduduk yang ada dalam situasi kurang mampu secara ekonomi. Pada makna lainnya, pertumbuhan ekonomi tidak memberi efek yang efisien guna menurunkan ketimpangan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai dampak positif bagi ketimpangan pendapatan, di mana kenaikan sejumlah 1% pada IPM berkontribusi bagi kenaikan ketimpangan pendapatan sejumlah 9,54%. Tetapi, secara individual, IPM tidak berdampak signifikan bagi ketimpangan pendapatan. Ada perbedaan IPM tertinggi serta terendah di Provinsi Banten sejumlah 17,57%, dimana menampilkan perlunya usaha guna mengatasi ketidakseimbangan kesejahteraan. Kabupaten Lebak mencatat IPM terendah di Provinsi Banten serta ada pada peringkat rendah secara nasional, khususnya pada aspek pendidikan. Hasil ini konsisten pada temuan dalam studi yang dijalankan oleh Febriyani & Anis (2022) dimana menyebut bila, meskipun Indeks Pembangunan Manusia memberi dampak positif, dampaknya tidak signifikan bagi ketimpangan pendapatan di Indonesia pada rentang waktu 2007-2016.

Jumlah penduduk berpengaruh negatif bagi ketimpangan pendapatan dimana bermakna bila tiap kenaikan sejumlah 1% pada jumlah penduduk bisa menjadikan penurunan sejumlah 2,54% pada ketimpangan pendapatan. Ini bermakna bila kenaikan jumlah penduduk bisa

menurunkan ketimpangan pendapatan. Pada konteks Provinsi Banten, pertumbuhan jumlah penduduk umumnya dikarenakan oleh migrasi menuju wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi, misalnya Tangerang. Walaupun pertumbuhan penduduk bertambah, hal ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sebab peluang kerja di wilayah industri masih tersedia. Temuan ini mendukung hasil pengamatan yang dijalankan oleh Arif & Wicaksana, (2017) dimana juga menjumpai bila jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan bagi presentase ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2011- 2015. Maknanya, total penduduk yang banyak maupun sedikit tidak secara signifikan memberi pengaruh bagi presentase ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

Hasil analisis menampilkan bila investasi berpengaruh positif serta signifikan bagi ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten. Kenaikan investasi sejumlah 1% bisa menambah ketimpangan pendapatan sejumlah 0,07%. Provinsi Banten, khususnya daerah Banten Utara, sudah berhasil menarik investasi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi. Sementara di daerah lain, minimnya investasi menjadikan ketimpangan pendapatan. Hasil ini selaras pada pengamatan Nurfifah et al. (2022) di Provinsi Sulawesi Utara, dimana menampilkan bila kenaikan investasi bisa menambah ketimpangan daerah.

Hasil identifikasi angka R-squared sejumlah 0,774281 menampilkan bila sekitar 77% dari variasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten bisa dijabarkan oleh variabel yang diteliti dan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini. Angka F-statistic yang signifikan menampilkan bila secara bersama-sama, variabel independen pada model ini berpengaruh bagi ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Laju pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan yang ada di kabupaten/kota provinsi ini. Hal ini berarti bermakna kenaikan laju pertumbuhan perekonomian akan menambah ketimpangan penerimaan di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2) tidak mempunyai pengaruh positif signifikan bagi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2012-2021. Kenaikan IPM tidak signifikan memberi pengaruh bagi peningkatan ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk (X_3) juga tidak mempunyai pengaruh negatif signifikan bagi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2012-2021. Kenaikan jumlah penduduk tidak signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Investasi (X_4) memberi pengaruh positif signifikan bagi ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2012-2021. Naiknya investasi bisa menambah ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Secara bersama-sama, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk, serta investasi mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2012-2021. Ini bermakna bila perubahan pada empat aspek ini secara bersama-sama memberi pengaruh bagi presentase ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I., & Morris, C. T. (1973). Analysis-of-Variance Techniques for the Study of Economic Development. *The Journal of Development Studies*, 8(1), 91–105. <https://doi.org/10.1080/00220387108421390>
- Arif, M., & Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 323–328.
- Doni Mahardiki, R. P. S. (2013). Analisis arah kebijakan ekonomi terhadap sektor pendidikan dalam peningkatan ipm. 5(62), 271–279. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Febriyani, A., & Anis, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9–16. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12375>
- Harahap, S. R. (2013). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 148–158.
- Indris Kamal, Syaparuddin, S. H. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(01), 41–62.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan, Edisi, 4*.
- Noviar, N. (2021). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.118>
- Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 22(5), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42318>
- Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i2.12637>
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). Pengantar Ekonomi Makro Ekonomi. *Raja Grafindo Persada. Jakarta*.
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2010- 2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227–252. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>